

**PERAN DAN UPAYA MAJELIS ULAMA INDONESIA JAWA  
TIMUR DALAM MODERASI PANDANGAN KEAGAMAAN**

**Skripsi**

**Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program**

**Studi Aqidah dan Filsafat Islam**



**OLEH :**

**MUHAMMAD WAHYU**

**NIM. E91216042**

**PRODI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2021**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Wahyu

NIM : E91216042

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

**Surabaya, 27 Juni 2021**

Saya yang menyatakan,



**Muhammad Wahyu**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Peran dan Upaya Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur dalam Moderasi Pandangan Keagamaan” yang ditulis oleh Muhammad Wahyu telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 27 Juni 2021

Pembimbing



**Fikri Mahzumi, S.Hum., M. Fil.I**  
**NIP. 198204152015031001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Peran dan Upaya Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur dalam Moderasi Pandangan Keagamaan” yang ditulis oleh Muhammad Wahyu ini telah dipertahankan di depan penguji skripsi pada tanggal

10 Juli 2021

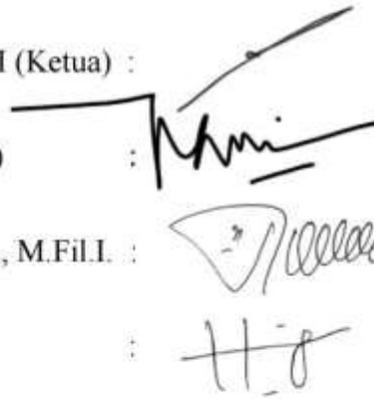
Tim Penguji Skripsi:

1. Fikri Mahzumi, S.Hum., M.Fil.I (Ketua) :

2. Dr. Rofhani, M.Ag. (Sekretaris) :

3. Dr. Mukhammad Zamzami, Lc., M.Fil.I. :

4. Hasan Mahfudh, M.Hum. :



Surabaya, 10 Juli 2021

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



**Dr. Kunawi, M.Ag**

**NIP. 196409181992031002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Wahyu  
NIM : E91216042  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat, Akidah dan Filsafat Islam  
E-mail address : muhammadwahyu71@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

**PERAN DAN UPAYA MAJELIS ULAMA INDONESIA JAWA TIMUR DALAM  
MODERASI PANDANGAN KEAGAMAAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2021

Penulis,

  
(Muhammad Wahyu)















sebagaimana yang dialami oleh sayap konservatif Muhammadiyah. Namun, apabila jika dibandingkan dengan konteks MUI, maka kedua hal inilah yang terjadi, ia akan lebih tertarik ke arah konservatisme.

Di era awal kemunculannya, MUI berslogan: “MUI melunakkan yang terlalu keras, dan mengeraskan yang terlalu lunak”. Sejak Munas tahun 2000, sayap progresif MUI mulai pudar selama kurang lebih 10 tahun sehingga membuat MUI mudah terjebak dalam konservatisme, di mana MUI sering menyebut diri dengan pelayan umat Islam “*khadim al-ummah*”, dan pada tahun 2005 MUI mengeluarkan fatwa anti liberalism, sekularisme, pluralisme. Serta pada tahun 2007 ia juga mengeluarkan fatwa tentang kriteria aliran sesat. Sejak saat itu juga terjadi pembersihan kelompok-kelompok progresif dari MUI. Sehingga yang terjadi, MUI kini terbang dengan satu sayap puritan konservatif.

Selama masa Orde Baru, slogan “melunakkan dan mengeraskan” itu belum ada, meskipun sebagian sudah dipraktikkan. Pada waktu itu MUI lebih ingin menggunakan “melunakkan yang terlalu keras”, tapi tanpa ada campur tangan dengan kelompok-kelompok keras. Karena kelompok keras pada waktu itu dilegalkan oleh negara, dan tidak memungkinkan didekati oleh MUI. Sehingga, kedekatan MUI lebih ke organisasi yang diuntungkan pada masa orde baru yaitu moderat, progresif dan juga liberal. MUI juga lebih memilih menjaga Islam moderat sesuai yang diagendakan oleh negara. Bahkan, saat itu juga MUI dianggap sebagai penasihat pemerintah. Artinya, setiap pemerintah mengajukan undang-undang bahwa ia tak akan lepas dari MUI semisal fatwa, walaupun tidak semuanya fatwa dan tausiah MUI mendukung pemerintahan. Namun, pada kasus Tanjung

Priok yang seharusnya menjadi masalah besar pada waktu, MUI seakan menutup mata terhadap kasus yang melibatkan ratusan orang muslim meninggal dunia.

Sebelum adanya MUI, peran kementerian agama sebenarnya sudah sangat cukup untuk menyerap segala aspirasi keagamaan yang dikeluarkan oleh ormas Islam, selain pengadilan agama yang bersifat positif yang harus dilakukan pemerintah sebagai pembimbing untuk masyarakat muslim di Indonesia, di mana perannya berusaha ikut campur tangan terhadap otoritas keagamaan di Indonesia.. Seperti halnya mengucapkan salam beda agama, MUI mempunyai cara pandang sendiri dalam tata cara mengucapkan salam kepada non muslim. Seperti yang baru-baru ini terjadi yang terjadi kepada para pejabat tinggi negeri yang notabene diisi oleh orang-orang yang beberapa dari mereka adalah non muslim.

Merespons hal ini, KH. Abdusshomad Buchori menghimbau kepada MUI Jawa Timur dalam delapan butir atau tausiyah pokok pemikiran MUI Jawa Timur yang di antaranya adalah menyerukan agar umat Islam dan para pejabat negara yang beragama Islam cukup hanya mengucapkan kalimat salam pembuka khas agama Islam yaitu kalimat, *assalamu'alaikum, Wr. Wb.*, tanpa memberi salam yang diucapkan agama lain. MUI Jatim dalam hal ini berpendapat salam menurut agama Islam tidak hanya sekedar omong kosong melainkan sebuah lantunan doa supaya dapat rida dari Allah SWT, tuhan yang menjadi keyakinan seluruh kaum muslimin. Sementara salam menurut agama lain juga mencerminkan doa masing-masing agama tersebut. Dalam imbauan ini, MUI Jawa Timur juga menyatakan meski agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi, ada beberapa hal yang perlu juga dibatasi guna kembali memurnikan ajaran agama Islam.



















































Setiap umat Islam memberi hak kebebasan berpikir kepada setiap individu untuk berpendapat sesuai keyakinannya, bebas berpikir tapi bukan berpikiran bebas. Prinsip kebebasan berpikir inilah yang membuat agama Islam semakin kaya dengan khazanah corak dan pemikiran dalam Islam.

Namun, dalam sisi lain yang menjadi resiko dalam kebebasan berpendapat mengakibatkan adanya pemahaman terhadap seseorang yang tidak mempunyai daya kapasitas keilmuan yang cukup. Terlepas dari baik buruknya hal tersebut, perkembangan dinamika keislaman yang begitu pesat membuat banyaknya setiap individu melahirkan pemikiran-pemikiran Islam yang baru serta menjadi perbedaan pendapat yang cukup serius.

Allah Swt. menurunkan agama Islam untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia, yang dengan mengerjakan ajaran-Nya itu manusia akan bahagia di dunia dan di akhirat.

Maka ajaran Islam yang menjadi penuntun umat tersebut harus dipahami dahulu maksud dan isinya melalui sebuah pemahaman paripurna. Imam Syafi'i pernah berkata bahwa, ilmu lebih dahulu daripada amal. Maka pemahaman berpikir hanya akan bisa dilakukan oleh orang yang berakal dan berpikir.

Seperti pada sesi wawancara kepada salah satu anggota MUI yang menjabat sebagai salah satu anggota komisi ukhuwah islamiyah dan hubungan antar umat beragama MUI Jatim yakni KH. Lukman Haris Dimaythi. Beliau menjelaskan bahwasanya perbedaan pendapat itu adalah satu hal yang wajar dalam Islam, dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Sebagaimana yang sudah dijelaskan

























umumnya terjadi karena adanya sifat eksklusif atau berpihak sebelah, serta adanya gesekan antar kelompok beragama dalam meraih dukungan umat muslim yang tidak dilandasi oleh sifat toleran.

Kalau kita kembali lagi, bahwasanya pada masa lalu ada 2 kelompok yaitu (komunisme) garis kiri, dan (Islamisme) garis kanan yang menimbulkan disharmoni antar masyarakat. Namun pada zaman sekarang ancaman terbesar bagi masyarakat adalah globalisasi dan islamisme. Atau bisa disebut pasar dan agama.

Dalam konteks fundamentalisme beragama, untuk menghindari gesekan atau disharmoni tersebut kita harus menumbuhkan jiwa yang moderat atau beragama secara inklusif agar kita mempunyai sifat terbuka kepada semua perbedaan yang ada dalam Islam. Terbuka dan menerima keberagaman inklusifisme, baik itu beragama dalam bidang mazhab maupun dalam bidang agama, karena perbedaan tidak pernah menghalangi setiap individu untuk menjalin kerja sama satu sama lain.

Yang paling sering terjadi di Indonesia adalah demikian, menganggap bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling benar sampai melecehkan keyakinan agama lain sehingga menimbulkan pertikaian. Memang kita sebagai umat muslim harus meyakini agama Islam adalah agama yang hak, agama yang dipercayai membawa kepada kedamaian hati dan batin, agama yang mengajarkan kebaikan dan membawa ke jalan kebenaran.

Sebenarnya semua prinsip beragama ialah mengajarkan kebaikan, tapi dilihat dari beberapa aspek yang penulis lihat bahwa sifat ekstrimis yang





dari Timur Tengah untuk menyebarkan agama Islam, atau yang bisa kita sebut dengan wali sembilan (*wali songo*).

Wali sembilan merupakan sekumpulan wali yang datang dari Timur Tengah, untuk ditugaskan berdakwah menyebarkan Islam. Alhasil, tugas mereka pun sempurna karena mereka mempunyai metode yang bagus dalam berdakwah, dengan menggunakan metode melihat masyarakat, melihat kultur serta budaya orang Indonesia pada zaman dahulu, sehingga mereka sukses mengubah wajah Nusantara yang semula beragama Hindu menjadi muslim sampai sekarang.

Mereka pun menjadi panutan layaknya Nabi Muhammad sewaktu berdakwah di Mekkah maupun di Madinah, tidak ada perbedaan dalam mereka, itu karena panutan mereka hanyalah peran para wali yang senantiasa menjadi imam dan tempat untuk menyelesaikan masalah sosial maupun keagamaan pada masa itu, dan umat Islam pun menjadi damai tanpa adanya pertentangan serta perdebatan.

Dan sewaktu sepeninggal mereka, ajaran umat Islam mulai diteruskan oleh murid mereka, banyak ulama besar bermunculan seiring berkembangnya zaman untuk mengurus umat Islam hingga pada saat ini, sampai pada MUI yang merupakan organisasi untuk mengurus hak keberagamaan Islam di Indonesia.

Tapi sayangnya peran ulama tidak *sekompeten* ulama terdahulu, banyak ulama pada saat ini yang gemar memprovokasi bahkan mengkafirkan setiap individu muslim yang tidak sependapat dengan mereka, hal itu dikarenakan berbedanya dalam menelaah hadis Nabi dan kurangnya wawasan dalam mengkaji teks dalam al-Qur'an.





Sebuah organisasi Islam yang pengaruhnya cukup besar dalam dunia perislaman di Indonesia, banyak sekali fatwa-fatwa yang mereka keluarkan seketika pada saat Indonesia sedang gejolak-gejolaknya dalam masalah perbedaan pandang, hingga banyak sekali kata kafir yang keluar dari mulut masyarakat yang tidak sepaham dengan yang mereka yakini.

Dalam konteks pemberian fatwa misalnya, adalah hal yang wajib untuk memusyawarahkan keputusan bersama di saat berbeda pandangan, mereka mencoba menyatukan pendapat dari setiap tokoh tapi tidak luput untuk kembali kepada al-Qur'an dan hadis sahih, yang demikian itu merupakan hal yang wajib untuk mengembalikan rujukan kepadanya, karena itu merupakan pesan dari Allah dan juga Nabi Muhammad Saw. Hal itulah yang semestinya kita contoh sebagai umat muslim, meskipun banyaknya perbedaan keagamaan dalam kubu MUI, tapi jiwa moderatisme merekalah yang membuat mereka bisa bersatu, sehingga menjadi suatu organisasi Islam yang bisa menjadi panutan bangsa.

## **B. Implementasi Pandangan Moderasi Keagamaan MUI Jatim terhadap Peristiwa Keagamaan di Indonesia**

Pada sub bab ini penulis memotret dan menyajikan rangkaian pengamatan tentang bukti pandangan moderat MUI Jatim yang tersaji dalam tindakan, keputusan, komentar, atau bahkan fatwa terhadap isu-isu keagamaan yang menjadi pusat perhatian masyarakat dewasa ini, meliputi pemaknaan terhadap isu jihad, pluralisme, serta kasus Ahmadiyah dan Syiah yang pernah terjadi beberapa kurun waktu lalu. Mengingat sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh institusi besar akan

menempati posisi yang sangat sentral dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana Rahmad Ari Wibowo dalam artikelnya menyebutkan, bahwa peran fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga besar, dalam hal ini MUI Jatim akan menempati posisi yang bukan hanya sebagai *legal opinion* yang bersifat opsional (boleh diikuti atau tidak), melainkan lebih dari itu, menjadi sebuah pijakan *legal policy* bagi umat Islam di Jawa Timur dalam ruang lingkup regional, dan bagi masyarakat Indonesia dalam ruang lingkup nasional.<sup>2</sup>

Sebelum beranjak kepada pembahasan yang sudah penulis paparkan di atas, penulis ingin membuat *statement* penguat bahwa dalam situs webnya, MUI Jatim menulis sebuah artikel tentang makna moderasi/wasathiyah secara kompleks. Dalam artikel berjudul “Apakah Islam Washathiyah Itu?”, MUI Jatim menerangkan secara lugas tentang makna moderasi yang tentu juga sudah penulis paparkan dalam sub bab pada halaman-halaman sebelumnya.<sup>3</sup> Namun pemaknaan itu hanya seputar teoretis, meskipun beberapa bukti moderasi pandangan keagamaan secara praktik (kegiatan) sudah tercermin dari beberapa aktivitas kehidupan tokoh MUI Jatim yang sudah penulis wawancarai, tapi itu pun juga masih bersifat individu bukan atas dasar kolektif mewakili nama MUI Jatim secara keseluruhan. Maka dari itu, pada sub bab ini penulis ingin menyuguhkan bukti konkret agar memberikan dasar

---

<sup>2</sup> Rahmad Ari Wibowo, “Fatwa MUI tentang Penyimpangan Ajaran Islam dan Tindakan Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan”, *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1 (2013), 143.

<sup>3</sup> MUI Jatim, “Apakah Islam Washathiyah itu?”, dalam <https://muijatim.org/2020/12/02/apakah-islam-washathiyah-itu> diakses 19 Juli 2021.

penguat bahwa MUI Jatim benar-benar memiliki pandangan keagamaan yang moderat, dengan catatan definisi moderat yang sudah penulis jelaskan sebelumnya.

Jihad dan pluralisme menjadi sebuah problem tersendiri dalam diskursus pemahaman umat Islam. Masih hangat dalam ingatan, polemik pandangan terhadap jihad dan pluralisme ini menjadi ramai di tengah umat Islam dalam kurun waktu terakhir. Menindak lanjuti peristiwa tersebut MUI Jatim juga memiliki pemaknaan dan pandangannya sendiri. Memang, secara rinci terkait permasalahan tersebut MUI Jatim belum pernah memberikan respon dalam sebuah fatwa yang fokus membahas itu.

Mengingat posisi dari MUI Jatim adalah kepanjangan tangan dari MUI Pusat yang ada di Jakarta. Oleh karenanya, beberapa topik bahasan yang sensitif terkesan sering tidak direspon oleh MUI Jatim, hal tersebut sebetulnya adalah bentuk kehati-hatian dalam tubuh MUI Jatim yang di mana posisinya adalah untuk memayungi seluruh kelompok elemen keberagaman dalam agama Islam, sehingga keputusan untuk mengeluarkan fatwa-fatwa terhadap isu-isu sensitif terkadang lebih memilih menunggu dan saling berkoneksi terlebih dahulu kepada fatwa dari MUI Pusat.

Namun secara garis besar, jawaban MUI Jatim terhadap dua isu tersebut dapat penulis akses melalui hasil dari Ijtima Ulama Komisi MUI II di Gontor pada tahun 2006. Hasil dari ijtima tersebut mebuahkan sebuah fatwa atau keputusan bahwa, asas bernegara, dalam hal ini di Indonesia harus mensinergikan antara konteks kebangsaan dan konteks keagamaan, dengan begitu tidak akan ditemui

benturan antara negara dan agama. Dalam keputusan ijtima ulama tersebut juga berbicara tentang keharusan kepada setiap umat beragama, khususnya Islam untuk merawat serta menjaga keutuhan NKRI, karena konsep negara Indonesia adalah satu bentuk konsep final dalam usaha merawat keragaman umat beragama sehingga dapat hidup berdampingan. Yang kemudian, pada tahun 2009 diadakanlah ijtima ulama ke II di Padang Panjang sebagai usaha menyempurnakan hasil ijtima pertama. Di mana dalam ijtima yang kedua tersebut menghasilkan satu buah konsep rumusan matang yang tercantum dalam konsep implementasi *Islam rahmatan lil 'ālamīn* dan *sahih likulli zamān wa makān*.<sup>4</sup>

Dari hasil ijtima tersebut dapat ditarik kesimpulan sederhana, bahwa secara tidak langsung MUI Jatim memiliki pandangan bahwa menjaga negara kesatuan NKRI adalah salah satu bentuk konsep dari jihad. Konsep tersebut selaras dengan konsep resolusi jihad milik *Nahdhātul 'Ulamā'* yang memasukkan aktivitas menjaga keutuhan negara adalah sebagian dari cabang jihad, atau lebih sering dikenal dengan slogan “cinta negara adalah sebagian dari iman”.

Sedangkan untuk konsep implementasi *Islam rahmatan lil 'ālamīn*, hal tersebut menjawab akan permasalahan pluralisme. Secara tidak langsung MUI Jatim menghendaki dan mendukung kemajemukan dalam beragama. Mengingat paham pluralitas adalah sebuah paham keagamaan yang bersifat niscaya, pasti akan

---

<sup>4</sup> Dalam konsep tersebut mewajibkan kepada seluruh umat Islam untuk menerapkan dan mewujudkan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'ālamīn*, yang dalam konteks ini diwajibkan untuk merawat serta menjaga NKRI dan seluruh keragaman baik suku, budaya serta agama di dalamnya sehingga dapat tercipta hidup berdampingan dengan tentram dan sentosa. Lihat Ainul Yakin, “Harmonisasi Kerangka Berpikir Keagamaan dalam Konteks Kebangsaan” dalam <https://muijatim.org/2019/03/10/> diakses 19 Juli 2021.

ada dan menjelma seiring berkembangnya zaman. Bahkan konsep pluralitas juga sudah disebutkan dalam al-Qur'ān dan hadis Nabi, oleh karenanya teramat susah untuk menafikan unsur pluralitas dalam kehidupan manusia.<sup>5</sup> Namun harus digaris bawahi bahwa, konsep plural yang didukung di sini adalah seputar menghormati, menghargai, bersikap toleransi (tasamuh) terhadap keyakinan dan ritual peribadatan agama lain, mampu hidup berdampingan, namun tidak lepas kendali yakni sampai menjalankan peribadatan umat lain atau mencampur adukkan seluruh agama menjadi satu. Karena hal tersebut dinilai telah terlalu jauh dan keluar dari koridor akidah dalam setiap agama, seperti yang disampaikan oleh KH. Abdusshomad Buchori selaku wakil ketua di MUI Jatim.<sup>6</sup>

Terkait dengan persoalan Syiah, jamak diketahui bahwa MUI Jatim sangat menolak salah satu kelompok dalam Islam ini. Menurut pengakuan Abdusshomad Buchori, terdapat beberapa kesesatan terhadap akidah Syiah, serta menurutnya, eksistensi kelompok Syiah di Indonesia akan memberikan ancaman terhadap ketenteraman umat Islam di Indonesia, bahkan ketenteraman seluruh rakyat Indonesia. Karena menurut Buchori, selaku perwakilan dari MUI Jatim menilai bahwa Syiah lebih berbahaya daripada kelompok teroris ISIS. Ketakutan tersebut dipicu oleh rentan adanya konflik terhadap kelompok tersebut. Yang bisa saja

---

<sup>5</sup> Biyanto, "Berdamai dengan Pluralitas Paham Kerberagamaan", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 1 (2015), 187.

<sup>6</sup> Anonim, "MUI Jawa Timur Imbau Para Pejabat Tak Gunakan Salam Semua Agama" dalam <https://www.law-justice.co/artikel/75444/mui-jawa-timur-imbau-para-pejabat-tak-gunakan-salam-semua-agama/> diakses 19 07 2021.

sewaktu-waktu terjadi. Di mana titik puncaknya adalah konflik Syiah di Sampang yang terjadi beberapa tahun lalu.

Dalam memandang fakta ini, penulis mencoba untuk bersikap objektif, bahwasanya secara lini ini pandangan moderasi keagamaan dalam tubuh MUI Jatim memang terkesan lemah. Namun, jika melihat sebab dasar pengambilan keputusan tersebut dilandasi oleh ketakutan dan upaya untuk menjaga keutuhan NKRI dari kelompok-kelompok yang ingin merusaknya, sepertinya keputusan MUI Jatim tersebut tidak sepenuhnya salah, sebagaimana tindakan deradikalisasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah dan seluruh elemen umat beragama untuk menolak ideologi radikalisme beragama atau kelompok-kelompok yang memiliki pemahaman keberagaman yang keras, konservatif, dan berujung pada tindakan anarkis serta teroris. Dalam lini ini dimensi teologis serta sosial memang harus di ke depankan. Tujuannya semata-mata agar tetap terpeliharanya corak pandang keagamaan yang moderat pada diri setiap umat beragama, khususnya Islam.

Sedangkan pandangan MUI Jatim terhadap kelompok Ahmadiyah tidak jauh berbeda dengan sikap MUI Jatim terhadap Syiah. Dalam tubuh Ahmadiyah terdapat kesesatan dalam segi akidah dan keimanan, serta rentan memicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Maka menurut Abdusshomad Buchori untuk para pengikut Ahmadiyah supaya lekas melepas keyakinannya itu dan kembali kepada jalan yang benar yakni ajaran Islam pada umumnya yang memiliki pandangan serta













beberapa kondisi sosial politik maupun sosial keagamaan. Secara *objektifikasi*, istilah moderasi MUI dimaknai sebagai istilah mengambil jalan tengah dalam beragama, tidak memihak satu sama lain, menjadi penengah dalam setiap masalah yang terjadi, yang berpotensi membuat umat muslim menjadi tidak harmonis sebagai akibat dari sebuah perbedaan pandangan. Dan secara *internalisasi*, proses konstruksi MUI dalam upaya membangkitkan jiwa muslim yang moderat dimulai dari sebuah pemahaman bagaimana sifat karakteristik dari moderat itu sendiri, jika istilah moderat dipahami dengan sempit, maka yang terjadi adalah masyarakat yang sempit pula dalam tindakannya, sebagaimana akan membuat minim aspek toleransi, minim rasa empati, bersifat eksklusif, dan lain sebagainya.

## **B. Saran**

Kepada umat muslim lebih tepatnya di Jawa Timur, hendaknya lebih objektif lagi dalam menyikapi permasalahan atau isu-isu perbedaan pandangan yang sering terjadi di Jatim maupun Indonesia, dengan belajar kitab suci tidak hanya dengan bacaan, tapi harus dicerna dengan akal, fikiran, wawasan, serta berguru langsung kepada seorang guru agama supaya tidak terjatuh ke jurang kesesatan, agar pengetahuan tidak sempit dan bisa lebih luas lagi dalam memahami ajaran Islam, dan bisa menjadi seorang muslim yang moderat seperti yang dikatakan Rasulullah Saw.

Kepada pihak organisasi MUI, diharapkan dapat memberikan pemahaman-pemahaman secara komprehensif tentang Islam moderat (*Islamic Moderation*) sehingga masyarakat terutama generasi muda bisa lebih terbuka dan







